



# Kalbar Terima WTP Lagi

Pemerintah Kalbar kembali mendapatkan reward dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan berupa penghargaan atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan Keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan Pemerintah, Kamis (12/9).

**Borneo Tribune, Jakarta**

Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof Dr Budiono didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Muhammad Khatib Basri, kepada 69 Kementerian Negara dan lembaga serta 116 Pemerintah Daerah, dan reward Pemerintah Pusat ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM.

Acara yang berlangsung di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan tersebut dihadiri

oleh para Menteri dan pimpinan lembaga, Badan Anggaran DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan, para pejabat pengelola keuangan dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga, para Kepala Daerah, Lembaga Internasional, Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan beberapa Institusi terkait.

Wapres Budiono menyampaikan bahwa Pemerintah sangat menyambut baik dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan pelaporan keuangan, hal ini

...Ke Halaman -11



**REWARD WTP.** Wakil Presiden RI Prof Dr Budiono menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Kalbar atas keberhasilan dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan Keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan Pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Wagub Kalbar Drs.Christiandy Sanjaya, SE, MM di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Kamis (12/9).  
FOTO Ruslan/Staf Humas Pemprov.



## Kalbar Terima WTP Lagi

diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana dalam menciptakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik serta peningkatan kualitas laporan keuangan yang menghasilkan keuangan Negara yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, menyampaikan tentunya patut kita syukuri, bahwa Provinsi Kalbar mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas opini audit dari BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan penghargaan tersebut menurut Wagub sesuai dengan arahan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, tentunya Pemerintah Kalbar akan berupaya untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan di Daerah.

"Tantangan kedepannya memang sangat berat, untuk itulah kedepannya saya berharap kepada seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalbar yang masih belum mendapat predikat tersebut (WTP) untuk dapat segera disele-

saikan sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Kalbar juga akan mendapat predikat yang sama," kata Christiandy Sanjaya, usai menerima Penghargaan Pemerintah Pusat mewakili Gubernur Kalbar, Drs Cornelis.

Menteri Keuangan RI Muhamad Khatib Basri mengatakan dilaksanakannya Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2013 ini dilatarbelakangi oleh terbitnya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara diantaranya yaitu UU nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbandahaan Negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, efisien, ekonomis dan efektif termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara.

Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, semenjak tahun 2005 untuk pertama kali pemerintah pusat telah berhasil menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawab-

an pelaksanaan APBN tahun anggaran 2004 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan LKPP tersebut setelah diaudit dan diberikan opini oleh BPK RI, disampaikan kepada DPR enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dimana pada tahun-tahun sebelumnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tersebut hanya berupa perhitungan anggaran Negara yang disampaikan kepada DPR untuk dibahas menjadi UU dua tahun sesudah berakhir tahun anggaran.

Adapun tujuan dilaksanakannya Rakernas ini, menurut Menkeu adalah untuk membangun sinergi antara para pejabat pengelola keuangan Negara Kementerian Negara, Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, dan bersama membangun komunikasi dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi terhadap berbagai permasalahan berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara serta menumbuhkan sinergi

antara para pejabat pengelola keuangan Pemerintah.

Tercapainya LKPP, LKPD dan LKKL yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance, tercapainya opini WTP, tersedianya informasi keuangan Pemerintah yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya yang berguna untuk pengambilan kebijakan, serta terlaksananya akuntansi berbasis akural dalam pelaporan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2015.

Berdasarkan data realisasi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) thn. 2007- 4, 2008- 13, 2009- 15, 2010- 34, 2011- 67, 2012- 116, opini Wajar dengan pengecualian (Qualified) thn. 2007- 283, 2008- 323, 2009- 330, 2010- 341, 2011- 349, 2012- 286, opini tidak memberikan pendapat (Disclaimer) thn. 2007- 123, 2008- 118, 2009- 111, 2010- 121, 2011- 96, 2012- 37, untuk opini Tidak Wajar (Adverse) thn. 2007- 59, 2008- 31, 2009- 48, 2010- 26, 2011- 8 dan 2012- 4. (Lay/Rsl/R).